

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada negara berkembang salah satu yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan kegiatan negaranya adalah pembangunan nasional, begitu halnya dengan bangsa Indonesia. Salah satu hal yang diperhatikan dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah ekonomi kerakyatan. Hal ini yang menjadi fokus pemerintah saat ini. Pemerintah melakukan inovatif dalam mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan ini.

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan salah satu inovasi dari ekonomi kerakyatan ini. Usaha mikro kecil dan menengah mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi. Usaha mikro kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan stabilitas di bidang ekonomi. Selain itu, usaha mikro kecil dan menengah juga menjadi salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat.

Kuncoro (2009 : 50) mengemukakan tantangan yang dihadapi usaha mikro kecil dan menengah untuk memperkuat struktur perekonomian nasional cukup berat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengupayakan pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah di tengah arus globalisasi dan tingginya

persaingan yang membuat usaha mikro kecil dan menengah harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas dalam memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah seperti yang tercantum pada Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 21 Tahun 2020, bidang Pemberdayaan Usaha mikro menyelenggarakan fungsi pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro meliputi fasilitasi usaha mikro dan kecil, pengembangan penguatan dan perlindungan usaha mikro dan kecil, dan peningkatan kualitas kewirausahaan.

Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan kecamatan yang terbesar di Kabupaten Deli Serdang serta memiliki letak wilayah strategis memiliki potensi pengembangan ekonomi daerah khususnya di bidang usaha mikro. Hanya saja pelaku usaha mikro di Kecamatan Percut Sei Tuan masih enggan untuk melaporkan usaha mereka ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Deli Serdang karena masih belum mengetahui dengan jelas apa manfaat pemberdayaan melalui pembinaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Deli Serdang sehingga banyak dari pelaku usaha mikro cenderung monoton terhadap produk yang dijual dan tentunya minim terhadap pola kemitraan.

Dengan adanya permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro di Kecamatan Percut Sei Tuan maka dibutuhkan peran serta pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang

sehingga dapat menghasilkan produk yang berdaya saing dan mengembangkan usaha mikro khususnya di wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sehingga kedepannya menjadi usaha mikro yang produktif dan berkembang. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Memberdayakan Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Percut Sei Tuan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah menjadi :

Bagaimana peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam memberdayakan pelaku usaha mikro di Kecamatan Percut Sei Tuan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam memberdayakan pelaku usaha mikro di Kecamatan Percut Sei Tuan.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara umum hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi dunia pendidikan, serta memperkaya hasil penelitian tentang peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam memberdayakan pelaku usaha mikro.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat memperoleh informasi mengenai peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam memberdayakan usaha mikro di Kecamatan Percut Sei Tuan.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah mendapatkan informasi dan bahan evaluasi dalam memberdayakan usaha mikro di Kecamatan Percut Sei Tuan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai acuan bahan informasi sekaligus bahan pertimbangan agar penelitian selanjutnya bisa lebih efisien serta suatu sumbangan pemikiran dan pengetahuan di bidang Peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam memberdayakan usaha mikro

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Peranan

Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Menurut Soekanto (2014:210), berpendapat bahwa peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Lanjutnya peranan merupakan aspek dinamis kedudukan, Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup 3 hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial bagi masyarakat.

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan

unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat (Soekanto 2014 :211).

Menurut Siagian (2000 : 142-150) menyatakan bahwa peranan penting pemerintah terlibat dalam lima wujud utama. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif., melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.
- b. Inovator, dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (legitimacy) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konsepsional, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.
- c. Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.
- d. Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.

e. Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Siagian, (Blakely, 1989:78-81) dalam Mudrajad Kuncoro (2004, 113-114) menyatakan bahwa peran pemerintah dapat mencakup peran-peran wirausaha (entrepreneur), koordinator, fasilitator dan stimulator.

a. Wirausaha (entrepreneur), sebagai wirausaha pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga untuk alasan perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang bersifat ekonomi. Hal tersebut bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat dan bisa mensejahterakan perekonomian di sekitar.

b. Koordinator, pemerintah daerah dapat bertindak sebagai coordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perencanaan pengembangan pariwisata daerah atau perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan di mana sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya.

c. Fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan.

d. Stimulator, pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut. Berbagai macam fasilitas dapat disediakan untuk menarik pengusaha, dalam bidang kepariwisataan pemerintah daerah dapat mempromosikan tema atau kegiatan khusus di objek wisata tertentu. serta pembinaan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia yang ada

dan tersedia, dengan selalu mendasarkan pada kesatuan wilayah nasional dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memelihara lingkungan hidup dan diarahkan untuk mendukung upaya pertahanan keamanan.

2.2 Pemberdayaan Usaha Mikro

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki percaya diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Menurut Totok Mardikanto & Poerwoko Seobiato (2017:113), istilah pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses pemberian dan atau optimalisasi daya (yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat), baik daya dalam pengertian “kemampuan dan keberanian” maupun daya dalam arti “kekuasaan atau posisi-tawar”. Dalam praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan (poverty alleviation) atau penanggulangan kemiskinan (poverty reduction). Karena itu kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan (income generating).

Selanjutnya menurut Totok Mardikanto & Poerwoko Seobiato (2017:63), adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan masyarakatnya dalam arti luas).

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Di tambahkannya Mardikanto & Soebiato (2017:159) pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut ;

- 1) Menyusun instrument pengumpulan data. Dalam kegiatan ini informasi yang diperlukan dapat berupa hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, referensi yang ada, dari hasil temuan dari pengamatan-lapangan;
- 2) Membangun pemahaman, komitmen untuk mendorong kemandirian individu, keluarga, dan masyarakat;
- 3) Mempersiapkan sistem informasi, mengembangkan sistem analisis, intervensi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat.

Menurut Edi Suharto dalam buku (2009:67-68). Pendekatan pemberdayaan dapat dicapai melalui 5P yaitu:

- 1) Pertama, pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.

- 2) Kedua, penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
- 3) Ketiga, perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat.
- 4) Keempat, penyokongan, pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- 5) Kelima, pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Dari beberapa pernyataan tentang pengertian pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya pengembangan suatu potensi yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok guna meningkatkan taraf hidupnya melalui berbagai kegiatan peningkatan keterampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan, atau penguasaan terhadap teknologi dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

2.2.2 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan menurut Chabib Soleh (2014) menjelaskan secara rinci untuk mencapai tujuan yang bersifat umum tersebut, terdapat beberapa sasaran antara lain yaitu:

1. Perbaikan kelembagaan, hal ini dimaksudkan agar terjalin kerjasama dan kemitraan antar pemangku kepentingan. Melalui beberapa perbaikan kelembagaan, berbagai inovasi social yang dilakukan secara kemitraan antar pemangku kepentingan dapat meningkatkan hasil produktifitas masyarakat.
2. Perbaikan pendapatan, stabilitas ekonomi, keamanan, dan politik yang mutlak diperlukan untuk terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan
3. Perbaikan lingkungan hidup. Disadari atau tidak dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat melakukan aktivitas ekonomi yang berakibat terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan ini bukan saja mengancam dirinya, tetapi juga mengancam kehidupan generasi yang akan datang.
4. Perbaikan akses, baik berkenaan dengan akses inovasi tekhnologi, permodalan/kredit, sarana dan prasarana produksi, peralatan dan mesin

serta energy listrik yang sangat diperlukan dalam akses produksi. Demikian pula tidak kalah pentingnya perbaikan akses pasar dan jaminan harga serta pengambilan keputusan politik.

5. Perbaikan tindakan. Melalui pendidikan, kualitas SDM dapat ditingkatkan sehingga dari sana diharapkan akan berdampak pada perbaikan sikap dan tindakan yang lebih bermanfaat.

6. Perbaikan usaha produktif. Melalui upaya pendidikan dan latihan dan perbaikan kelembagaan serta akses perkreditan, diharapkan usaha-usaha yang bersifat produktif akan lebih maju dan berdaya saing.

7. Perbaikan bidang lainnya, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pada sebuah lingkungan masyarakat.

Pendapat mengenai tujuan pemberdayaan yang dijelaskan oleh Soleh dapat dipahami, bahwa proses pemberdayaan mempunyai tujuan sebagai sebuah strategi peningkatan produktifitas masyarakat agar lebih meningkatkan kualitas hidupnya melalui beberapa perbaikan yang menyangkut aspek ekonomi, fisik, mental, politik, keamanan dan social budaya.

2.2.3 Pengertian Usaha Mikro

Ada beberapa pengertian usaha mikro menurut para ahli atau pihak yang langsung berhubungan dengan usaha mikro, antara lain :

Definisi Usaha Mikro secara tidak langsung sudah termasuk dalam definisi Usaha Kecil berdasarkan UU No.9 tahun 1995, namun secara spesifik didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2013, usaha mikro usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp100 000 000.00 per tahun.

2.2.4 Kriteria Usaha Mikro

Menurut Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021, kriteria usaha mikro diklasifikasikan menurut modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria usaha mikro yaitu modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2.2.5 Peran Usaha Mikro

Peran usaha mikro dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari (Kementerian Koperasi dan UKM, 2005) yaitu:

- a. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor
- b. Penyedia lapangan kerja terbesar
- c. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat
- d. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi
- e. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Sedangkan menurut UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan

menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. UMKM berperan dalam pembangunan perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap PDB, penciptaan lapangan pekerjaan, dan penyerapan tenaga kerja.

2.2.6 Pemberdayaan Usaha Mikro

Pemberdayaan UMKM sebagai suatu proses program harus tetap direncanakan secara serius dan lebih memfokuskan pada upaya-upaya yang membuat pelaku UMKM agar dapat lebih pandai dan mampu mengembangkan komunikasi antar mereka sehingga pada akhirnya mereka saling dapat berdiskusi secara konstruktif dan mengatasi permasalahan yang ada. Jadi, ketika agen pengubah, baik yang berasal dari lembaga pemerintahan atau nonpemerintah telah menyelesaikan program pemberdayaan UMKM tersebut, pemberdayaan UMKM sebagai suatu proses dapat terus berlangsung.

Dalam rangka pemberdayaan UMKM di Indonesia, Bank Indonesia mengembangkan filosofi lima jari/five finger philosophy, maksudnya setiap jari mempunyai peran masing-masing dan tidak dapat berdiri sendiri serta akan lebih kuat jika digunakan secara bersamaan.

1. Jari jempol, mewakili peran lembaga keuangan yang berperan dalam intermediasi keuangan, terutama untuk memberikan pinjaman/pembiayaan kepada nasabah mikro, kecil dan menengah serta sebagai agent of development (agen pembangunan)

2. Jari telunjuk, mewakili regulator yakni pemerintah dan Bank Indonesia yang berperan dalam Regulator sektor riil dan fiskal, menerbitkan ijin-ijin usaha, Mensertifikasi tanah sehingga dapat digunakan oleh UMKM sebagai agunan, menciptakan iklim yang kondusif dan sebagai sumber pembiayaan.

3. Jari tengah, mewakili katalisator yang berperan dalam mendukung perbankan dan UMKM, termasuk Promoting Enterprise to Credit (PEAC) Units, perusahaan penjamin kredit.

4. Jari manis, mewakili fasilitator yang berperan dalam mendampingi UMKM, khususnya usaha mikro, membantu UMKM untuk memperoleh pembiayaan bank, membantu bank dalam hal monitoring kredit dan konsultasi pengembangan UMKM

5. Jari kelingking, mewakili UMKM yang berperan dalam pelaku usaha, pembayar pajak dan pembukaan tenaga kerja.

Pemberdayaan UMKM digambarkan melalui 5 aspek, sebagai berikut:

1. Permodalan

Menurut Riyanto dan Primyastanto (2016 : 55) permodalan secara kajian ilmu ekonomi adalah bahan mentah atau dana dalam bentuk uang kas yang digabungkan dengan faktor produksi berupa tanah dan tenaga kerja berkolaborasi untuk menghasilkan suatu barang baru.

2. Pemasaran

Menurut Dermanto dan Wardaya (2016 : 5) pemasaran ini merupakan proses dari seseorang atau organisasi untuk mempengaruhi orang lain atau organisasi lain agar mereka yang menginginkan dan memerlukan produk atau jasa dapat terpenuhi dan mereka yang memiliki produk atau jasa dapat memperoleh keuntungan. Hubungan ini diharapkan dapat berjalan dalam waktu jangka panjang.

3. Teknologi

Menurut Djaktar (2012 : 174) untuk mempercepat kemajuan aktifitas bisnis sudah barang tentu perlu mengadopsi penggunaan teknologi sebagai infrastruktur manajemen yang harus dilakukan. Memanfaatkan jasa telpon, faksimile, e-mail, internet, dan lain sebagainya yang kian hari kian modern dengan sendirinya merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dihindari. Tanpa banyak mengadopsi jasa beragam teknologi tersebut, manajemen sebuah perusahaan tidak akan berjalan cepat atau mampu mengimbangi kemajuan perusahaan lain yang lebih maju untuk menjadi mitra bisnisnya.

4. Sumber Daya Manusia

Menurut Sutrisno (2009 : 4) sumber daya diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari diri manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Dengan berpegang pada pengertian tersebut, istilah sumber daya manusia adalah manusia bersumber daya dan merupakan kekuatan (power).

5. Perizinan

Menurut Yusriadi (2018 : 92) pelayanan administrasi pemerintahan atau pelayanan perizinan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan yang ada pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan Pusat, di Daerah, dan lingkungan BUMN atau BUMD, baik dalam rangka upaya pemenuhan

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bentuk produk pelayanannya adalah izin atau warkat.

2.2.7 Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 menyatakan Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

1. Aspek manajerial meliputi peningkatan produktivitas, pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia.
2. Aspek permodalan
3. Mengembangkan pola kemitraan
4. Mengembangkan sentra industri kecil dan pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (Kelompok Usaha Bersama); Kopinkra (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan).

2.2.8 Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut pasal 5 UU No. 20 Tahun 2008 adalah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan

2.3 Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu adalah untuk dasar pemikiran bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini sehingga dapat menambah pengetahuan tentang teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dari penelitian terdahulu ini, peneliti tidak menemukan judul yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Namun, peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu yang mana metode penelitiannya memiliki kesamaan dengan apa yang menjadi alasan kajian penelitian ini dan digunakan sebagai referensi untuk menambah pengetahuan pada penelitian ini.

1. Christofer Ondang, Frans Singkoh, Neni Kumayas (2019), “ *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa (Suatu studi di Dinas Koperasi dan UKM)*”. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui dinas koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa terhadap kemandirian UMKM di Minahasa. Hasil penelitian ini adalah dalam melaksanakan pelaksanaan pemberdayaan di Kabupaten Minahasa, Dinas Koperasi dan UKM telah menjalankan peran fasilitatif (menunjang produktifitas dan pemasaran hasil produksi), peran edukasional (pelatihan keterampilan usaha untuk membantu meningkatkan produktivitas hasil usaha), peran representative (bekerjasama dengan pihak perbankan dalam memberikan bantuan pinjaman lunak untuk pemberdayaan pelaku UMKM, dan peran teknis (keterampilan ASN

dalam menggunakan komputer untuk menunjang tugas dalam melakukan pendataan jumlah pelaku usaha yang masih aktif, jenis-jenis usaha, tipe usaha, serta pendataan anggaran dan pembuatan laporan hasil kinerja.

2. Dwi Sepriyono Nur (2017), *“Peran Dinas Koperasi dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda”*. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data dan penyimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan iklim usaha yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM dalam rangka menumbuhkan jumlah UKM di Kota Samarinda dengan memberikan kemudahan perijinan serta dukungan serta regulasi yang kuat agar UKM dapat berdaya saing dan mampu tumbuh berkembang, pertumbuhan unit-unit usaha baru yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM yaitu melakukan kegiatan Temu UKM dalam upaya peningkatan jumlah pelaku UKM di Kota Samarinda. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM meliputi kegiatan peningkatan Kapasitas SDM melalui pelatihan serta pemasaran produk UKM di Kota Samarinda. Faktor pendukung kegiatan pemberdayaan UKM di Kota Samarinda meliputi dukungan fasilitasi pembiayaan dari perbankan serta dukungan dari asosiasi UKM yang berperan aktif dalam mendukung program pemberdayaan Dinas Koperasi dan UKM sedangkan faktor penghambat keterlambatan anggaran

dan minimnya tenaga penyuluh UKM. Diharapkan terus adanya inovasi dari Dinas Koperasi dan UKM untuk lebih meningkatkan pelayanan sehingga UMKM di Kota Samarinda dapat tumbuh berkembang dan memiliki daya saing.

3. Murdani, Sus Widayani, Hadromi (2019), *“Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang)”*. Hasil penelitian ini adalah dari berbagai program atau proyek pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi baik IDT, P3DT, PPK, KUR, PPM Mandiri, P2KP, dan sebagainya yang secara umum memiliki kemiripan dimensi pendekatan, seperti bantuan modal, bantuan pembangunan prasarana, pengembangan kelembagaan lokal, penguatan dan pembangunan kemitraan usaha, dan fasilitas dari pendampingan. Faktor pendukung dalam pengembangan masyarakat di bidang ekonomi ini meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan modal, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat yang rendah.

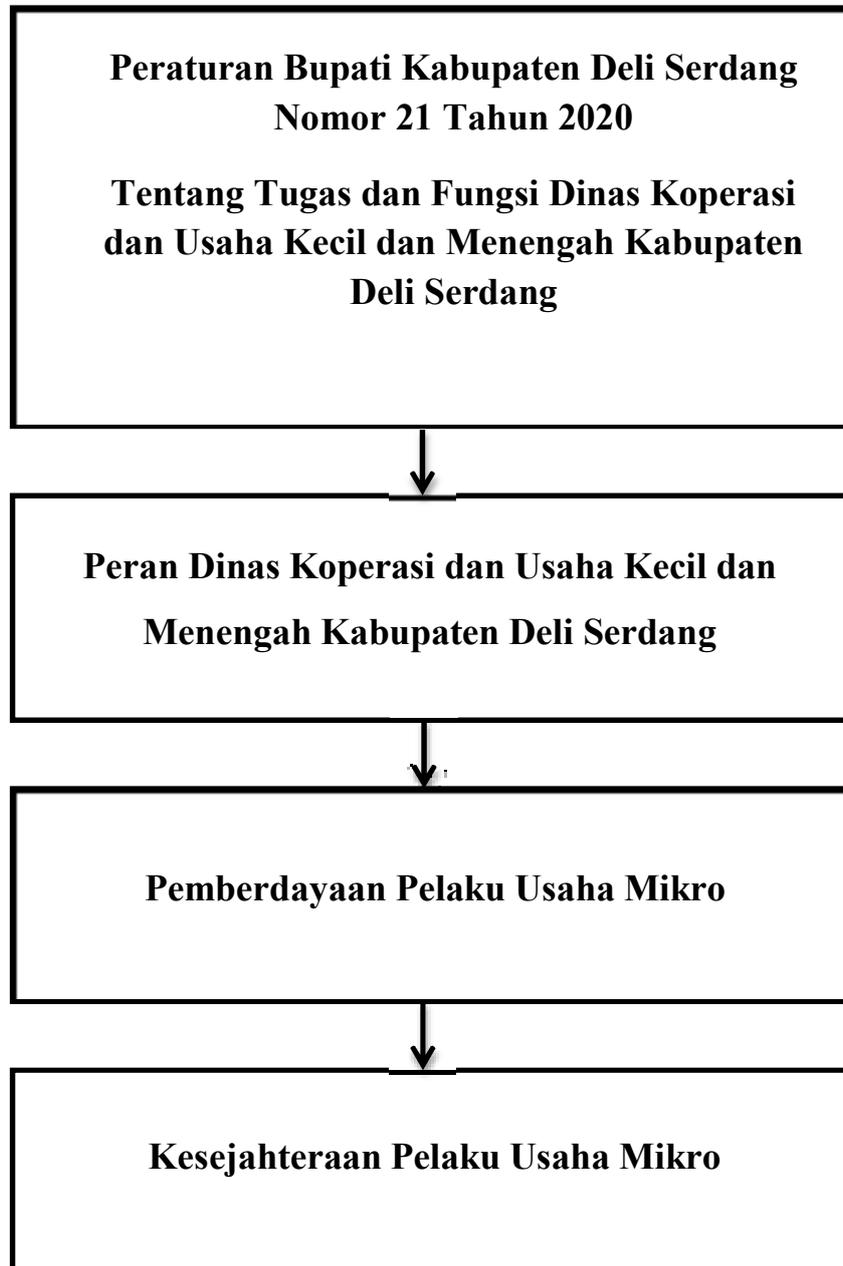
2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah alat berpikir suatu penelitian dan penjelasan pemahaman pokok tentang permasalahan yang hendak diteliti. Dengan adanya kerangka berpikir dapat memberikan pedoman dan mempermudah dalam kegiatan penelitian pengelolaan data, juga untuk menganalisa agar mendapatkan hasil penelitian yang benar, maka penulis membuat kerangka pemikiran dengan menjabarkan penelitian yang akan dibahas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi

dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka mengakomodir sekaligus memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah agar lebih produktif dalam tujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas dalam memberdayakan pelaku usaha mikro. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah disebutkan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melaksanakan pemberdayaan melalui pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan, pengembangan penguatan dan perlindungan, dan peningkatan kualitas kewirausahaan. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah akan berdampak terhadap kesejahteraan pelaku usaha mikro.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung kelapangan. Penelitian yang dilakukan tanpa menggunakan pengolahan data dengan angka-angka melainkan dengan hasil pengamatan peneliti terhadap fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut Moleong (2007:6) penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian cocok digunakan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penelitian perilaku, sikap, motivasi, persepsi dan tindakan subjek.

Pendekatan yang digunakan deskriptif kualitatif yakni menjelaskan dan menggambarkan berbagai karakteristik data dengan tujuan untuk memberikan uraian yang sedalam-dalamnya tentang topik yang dibahas sehingga para pembaca memperoleh tambahan informasi. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. penelitian deskriptif adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang di Jalan Karya Utama No.4, Lubuk Pakam. Lokasi ini dipilih untuk tempat penelitian agar data yang diperoleh sesuai dengan masalah yang diangkat dengan alasan mengetahui peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam memberdayakan pelaku usaha mikro di Kecamatan Percut Sei Tuan. Penelitian ini dimulai mulai bulan Juni.

3.3 Informan Penelitian

Untuk mendapatkan data-data dan informasi lengkap yang berkaitan dengan penelitian, maka peneliti memerlukan informan guna melengkapi kesempurnaan penelitian, informan tersebut diantaranya adalah :

1. Informan kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Berdasarkan pengertian informan kunci diatas, peneliti memutuskan bahwa informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang yaitu Ibu Dra.Hj.Rabiatul Adawiyah Lubis, M.Pd

2. Informan utama

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Dari pengertian informan

utama diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro yaitu Bapak Nugraha Ari Syahputra, S.Pd

3. Informan tambahan

Informan tambahan adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Berdasarkan pengertian informan pendukung diatas, peneliti memutuskan bahwa informan pendukung dalam penelitian ini adalah tiga pelaku usaha mikro yang sudah menjadi binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Deli Serdang di Desa Kecamatan Percut Sei Tuan dari 18 Desa secara keseleuruhan di Kecamatan Percut Sei Tuan. Alasan penulis memilih tiga pelaku usaha mikro adalah ketiganya memiliki perbedaan waktu bergabung menjadi binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Deli Serdang. Diantara 3 pelaku usaha mikro tersebut mewakili dari jumlah keseluruhan pelaku usaha mikro binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Deli Serdang. Diantaranya Ibu Eva Sorrowah (Zaza Siregar Cake and Catering), Ibu Irma Tanjung (Dapoer Umami 4ZEE), dan Ibu Nuriyah (Izbil Donat and Bakery). Ibu Eva Sorrowah merupakan pelaku usaha mikro binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Deli Serdang yang baru bergabung menjadi binaan di tahun 2023. Ibu Irma Tanjung merupakan pelaku usaha mikro binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang yang bergabung sejak tahun 2022. Sedangkan Ibu Nuriyah merupakan pelaku usaha mikro binaan

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2018 dan merupakan pelaku usaha mikro yang produknya selalu diikutsertakan ke dalam event oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Deli Serdang (produk andalan).

3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bagian terpenting dari suatu penelitian, karena dengan data peneliti dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Pada penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Sesuai dengan karakteristik data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka jenis data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Sumber data primer dapat dilakukan melalui wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung (Sugiyono, 2016). Adapun cara peneliti untuk mendapatkan data primer, yaitu menggunakan :

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan serta langsung bertatap muka dengan informan. Dalam wawancara, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dalam artian, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.

Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan alat bantu untuk mewawancarai informan seperti pulpen atau pensil, buku tulis (*notes*), surat izin/surat tugas, soal yang telah disusun, instrumen, alat perekam guna untuk merekam apa yang dikatakan oleh informan dan kamera guna untuk mengambil gambar dalam proses wawancara. Selain observasi, peneliti juga menggunakan teknik wawancara sebagai sumber untuk mendapatkan dan menguatkan data atau informasi yang lebih mendalam yang didapatkan dalam penelitian ini melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Deli Serdang dan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro serta masyarakat pelaku usaha mikro di Kecamatan Percut Sei Tuan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada, sehingga penulis tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti. Data sekunder bisa dilakukan melalui dokumentasi, jurnal, buku dan sumber lain yang mendukung. Adapun cara peneliti untuk mendapatkan data sekunder, yaitu menggunakan :

1. Dokumentasi

Kata 'dokumen' berasal dari bahasa latin yaitu *docere*, yang berarti mengajar. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2007:329).

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya

monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

3.5 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik pengolahan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu memilih hal-hal yang pokok. Memfokuskan pada hal-hal yang penting, pengabstrakan data, dan memilah-milah data yang sudah dikumpulkan baik itu dari rekaman, observasi maupun dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Maka peneliti dapat merekam, mengambil data yang pokok dan penting akan diolah menjadi data yang lebih mudah dipahami, dikarenakan data-data yang didapatkan belum tersusun dengan rapi. Maka peneliti akan menyusun data tersebut dengan rapi sehingga pembaca nantinya lebih mudah memahaminya.

Teknik analisis data adalah proses mencari solusi dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti. Setelah data dikumpulkan, kemudian dihubungkan dengan teori yang ada. Proses analisis data dilakukan dengan cara menganalisis data-data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan kemudian dideskripsikan.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Nurdin dan Sri Hartati, 2019:206), menyatakan bahwa analisis data kualitatif adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Reduksi data menurut mereka adalah kegiatan pemilihan data penting dan tidak penting dari data yang terkumpul. Penyajian data diartikan sebagai penyajian informasi yang tersusun. Sedangkan kesimpulan data diartikan sebagai tafsiran atau interpretasi terhadap data yang telah disajikan.

Analisis data penelitian ini adalah menggunakan model analisis data Miles dan Huberman. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama maka dilakukan pengumpulan data dengan hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah-masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Reduksi Data

Peneliti melakukan perangkuman dengan memilih dan memilah data dan hal-hal yang pokok dan penting. Caranya ialah peneliti menulis ulang catatan-catatan lapangan yang dibuat (ketika wawancara). Apabila wawancara direkam, maka lakukan transkrip hasil rekaman terlebih dahulu, selanjutnya melakukan pemilahan terhadap informasi yang penting dan tidak penting dengan cara memberi tanda-tanda, kemudian penggalan bahan tertulis yang penting yang sesuai dengan yang dicari, dan penulis menginterpretasikan apa yang disampaikan oleh informan atau dokumen dalam penggalan tersebut.

3. Penyajian Data

Data yang telah disusun dari hasil reduksi, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi ke dalam suatu matrik atau bentuk yang mudah dipahami. Penyajian data yang mudah dipahami adalah cara yang paling penting dan utama dalam menganalisis data kualitatif yang valid.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah dilakukan penyajian data, tahap akhir peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari temuan data yang peneliti dapat dari lapangan. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan sebagai hasil wawancara atau dari dokumen. Setelah kesimpulan diambil, untuk memastikan tidak ada kesalahan data, peneliti kemudian mengecek ulang proses reduksi dan penyajian data.

